

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran pariwisata menjadi begitu penting bagi negara-negara dunia untuk mendukung kemajuan perekonomian nasional, selain penerimaan pada bidang ekspor-impor hingga pemasukan pada sektor pajak (*tax income*). Selain itu, pariwisata memiliki sifat *multiplier effect*, sehingga bukan hanya para pemerintah saja yang ikut mendapatkan keuntungan atas eksistensi pariwisata, namun juga masyarakat, perhotelan dan transportasi dan lain-lainnya. Atas pertimbangan inilah negara-negara dunia berupaya menggali dan mengembangkan potensi pariwisata secara serius. (Ashoer dan Revida, 2021:4)

Keberadaan Indonesia sebagai negara agraris ternyata memiliki berbagai potensi pariwisata yang potensial. Sektor pariwisata di Indonesia saat ini telah memberikan sumbangan dalam meningkatkan devisa maupun lapangan kerja. Kegiatan pariwisata sangat berperan besar dalam memberikan sumbangan bagi pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Namun, dibalik potensi tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Berdasarkan analisis sektor pariwisata dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, identifikasi masalah pada sektor pariwisata mencakup tiga hal, yaitu permasalahan aspek regulasi dan kebijakan, permasalahan infrastruktur, dan permasalahan aspek sumberdaya, terutama sumber daya manusia. (<http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/analisis-sektor-pariwisata-dan-dampaknya-terhadap-kemandirian-fiskal-daerah> pada tanggal 15 April 2022).

Sektor pariwisata di Indonesia memiliki peranan penting sebagai pilar penopang perekonomian nasional. Sejak dekade 2010-an, pariwisata menduduki peringkat ketiga setelah sektor minyak dan gas, serta kelapa sawit (CPO). Sejak tahun 2016 pertumbuhan rata-rata kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri rata-rata berkembang 10,7% pertahun. Pencapaian ini kemudian berkontribusi terhadap perekonomian nasional sekitar 3,05% dari total GDP (*gross domestic product*) dan kemudian meningkat menjadi 4,80% di tahun 2019. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 1.1. sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia Ditinjau Dari**  
**Prosentase GDP (*Gross Domestic Product*)**

No	Tahun	Dari Prosentase GDP ( <i>Gross Domestic Product</i> )
1.	2010	3,05%
2.	2011	4,00%
3.	2012	3,96%
4.	2013	4,02%
5.	2014	4,04%
6.	2015	4,25%
7.	2016	4,13%
8.	2017	4,11%
9.	2018	4,50%
10.	2019	4,80%

Sumber : Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, “Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia”,  
[https://bankdata.kemendparekraf.go.id/upload/document\\_satker/a6d2d69c8056a29657be2b5ac3107797.pdf](https://bankdata.kemendparekraf.go.id/upload/document_satker/a6d2d69c8056a29657be2b5ac3107797.pdf), diakses pada tanggal 15 April 2022.

Keberadaan pariwisata di Indonesia berkembang sebagai bagian dari interaksi masyarakat dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat ataupun

elemen-elemen lainnya bukan hanya pada kondisi normal, namun juga kondisi yang tidak normal atau yang dikenal dengan *force majeure* yaitu kondisi di luar kemampuan manusia. Beberapa kondisi *force majeure* yang menyebabkan kondisi ketidaknormalan komunikasi secara konvensional, diantaranya kondisi perang atau konflik, terjadinya bencana alam berskala besar hingga terjadinya pandemi wabah penyakit menular (Brunner,2019:128).

Dinamika pariwisata Indonesia pada tahun 2020 kemudian dihadapkan pada pandemi internasional Covid-19 yang melanda dunia yang berdampak negatif pada perkembangan pariwisata Indonesia. Pandemi Covid-19 dilaporkan pertama kali terjadi pada 27 Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China. WHO (*World Health Organization*) memperkirakan bahwa virus ini muncul dari pasar hewan dan makanan laut hidup di Distrik Jinghan. Pasar ini menjual beberapa satwa untuk dikonsumsi diantaranya kelelawar, biawak, unta, anjing, tikus dan beberapa jenis binatang lainnya. Di pasar inilah menjadi awal mula berkembangnya pandemi Covid-19.(nature.com)

Perkembangan Covid-19 yang semula hanya di sekitar Distrik Jinghan kemudian meluas hingga ke wilayah-wilayah lainnya di China. Pada akhir Januari 2020 pemerintah China memperkirakan wabah Covid-19 telah menyebar di seluruh wilayah China yang diperkirakan telah menginfeksi sekitar 34.800 orang. Dalam perkembangannya Covid-19 kemudian ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai pandemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Covid-19 membahayakan masyarakat karena virus ini mudah tertular. Penularan utama dari Covid-19 adalah

melalui droplet (tetesan kecil) yang dikeluarkan oleh penderita Covid-19 pada saat batuk atau bersin. Untuk mengurangi penyebaran mata rantai virus Covid-19, awalnya pemerintah membuat aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan membuat aturan baru yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berbasis mikro yang mulai berlaku dari tanggal 9 Maret 2021 sampai 21 Maret 2021 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 (Siahaan, 2020 : 9).

Perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak negatif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2020 hanya berjumlah 4.052.923 orang, sedangkan di tahun 2021 menurun menjadi 1.557.530 orang. (kemenparekraf.go.id) kondisi juga berdampak pada dinamika pariwisata daerah di Indonesia, termasuk beberapa daerah yang selama ini menjadi destinasi populer di Indonesia, seperti halnya Provinsi Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pariwisata di Provinsi DIY sebagian besar didominasi wisata alam, buatan, wisata budaya dan kuliner. Pariwisata DIY juga tidak lepas dari Kabupaten Bantul. Kabupaten ini berbatasan dengan Sleman dan Kota Yogyakarta di sebelah utara, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul di sebelah Timur, Kabupaten Kulonprogo di sebelah Barat dan Saumdera Hindia di sebelah Selatan (bantulkab.go.id). Kabupaten Bantul memiliki beberapa destinasi pariwisata yang cukup populer diantaranya, wisata alam meliputi Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Kuwaru, Puncak Becici, Hutan Pinus

Becici, pariwisata buatan diantaranya Kebun Buah Mangunan, Kampung Edukasi Watu Lumbang, Kampung Batik Giriloyo, Pariwisata Khusus diantaranya Pabrik Gula Madukismo. Kebun bunga Celosia dan lain-lainnya.(bantulkab.go.id)

Keberadaan destinasi pariwisata di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 mengalami depresiasi yang cukup parah akibat pandemi Covid-19. Menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada awal tahun 2020 ketika Covid-19 mulai menyebar kunjungan wisata di wilayah Bantul sebesar 999,233 orang dan tahun 2021 menurun menjadi 739.369 orang. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya maka jumlah ini menjadi pencapaian yang sangat kecil karena rata-rata kunjungan wisatawan sebelum tahun 2020 mencapai 2,4 juta orang pertahun. (<https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/2-tahun-mati-suri-2022-jadi-awal-kebangkitan-industri-pariwisata-bantul/> diakses pada tanggal 15 April 2022).

Pada akhir tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 menjadi babak baru bagi perkembangan pariwisata di Kabupaten Bantul. Untuk itulah, Pemerintah kabupaten Bantul dalam memulihkan sektor wisata pada masa new normal melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul menjadi strategi penting bersamaan dengan diterapkannya tatanan baru atau *new normal*. Institusi yang memiliki peranan penting dalam pemilihan sektor wisata tersebut adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Insitusi ini dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016. Tugas pokok dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul beberapa hal, masing-masing adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang pariwisata, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,

serta melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya.(pariwisata.bantulkab.go.id)

Pandemi Covid-19 di wilayah Bantul dan sekitarnya berdampak luas bagi dinamika sosial-ekonomi di kabupaten ini. Keberadaan pariwisata memiliki arti penting sebagai tempat bergantung hidup sebagian masyarakat Bantul, diantaranya penyedia transportasi dan akomodasi, rumah makan dan hotel, hingga redistribusi. Untuk itulah, peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menjadi fenomena yang penting untuk dapat memulihkan sektor pariwisata Kabupaten Bantul yang selama ini terdampak Covid-19.

Pariwisata di Kabupaten Bantul menjadi objek kajian pemerintah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena adanya beberapa, yaitu :

- a. *Pertama*, sektor pariwisata di kabupaten Bantul memiliki kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rata-rata mencapai 4,5 hingga 4,6 milyar pertahun sejak tahun 2016 dan ketika terjadi pandemi Covid-19 maka kondisi ini akan berpengaruh terhadap PAD dan meningkatnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul.
- b. *Kedua*, sektor pariwisata di kabupaten Bantul menjadi tumpuan hidup sekitar 19 ribu orang yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, seperti halnya pengelola penginapan, pengelola rumah makan dan restoran, jasa transportasi dan lain-lainnya yang sebagian besar diantaranya menjadi kelompok yang sangat terdampak pandemi Covid-19.
- c. *Ketiga*, dinamika sektor pariwisata di kabupaten Bantul di era pandemi menjadi tolok ukur hubungan antara pusat dan daerah terkait beberapa

ketentuan diantaranya PSBB (*Pembatasan Sosial Berskala Besar*), *new normal* dan lain-lainnya untuk diterapkan di sektor pariwisata di kabupaten Bantul sebagai kebijakan formal.(bantulkab.go.id)

Dengan demikian peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memulihkan sektor wisata pada masa *new normal* menjadi kajian ilmu pemerintahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini tidak lepas dari beberapa fakta tentang eksistensi pariwisata di wilayah ini yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan berbagai stakeholder yang terlibat. Selain itu, tema ini juga berkaitan dengan implementasi kebijakan publik yang menimbulkan sikap pro dan kontra, serta berbagai keterbatasan yang memerlukan berbagai evaluasi dalam upaya memulihkan sektor wisata di Kabupaten Bantul pada masa *new normal*.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik masalah sebagai yaitu :

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memulihkan sektor wisata pada masa *new normal* ?
2. Bagaimana hambatan dan pencapaian yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memulihkan sektor wisata pada masa *new normal* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memulihkan sektor wisata pada masa new normal.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan pencapaian yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memulihkan sektor wisata pada masa new normal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini meliputi dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam studi implementasi peran dan kebijakan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh publik, yaitu berkaitan dengan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memulihkan sektor wisata pada masa new normal. Di harapkan juga dengan dibuatnya penelitian ini mampu menjadi sumber yang relevan bagi peneliti dan akademisi ilmu pemerintahan lainnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah**

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pengaruh positif bagi pemerintah daerah, terkait dengan

peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memulihkan sektor wisata pada masa new normal.

b. Bagi Akademik

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian yang relevan dalam memahami peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memulihkan sektor wisata pada masa new normal.

c. Bagi Kalangan Umum

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi dan juga mampu memberikan penilaian kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam perannya memulihkan sektor wisata pada masa new normal.

#### **E. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)**

Tinjauan pustaka memiliki peranan penting sebagai refleksi penulis atas penelitian-penelitian terdahulu. Dengan demikian nantinya penelitian tersebut dapat memberi wacana, ide, gagasan sekaligus menyempurnakan berbagai analisa tentang tema yang sedang dibahas. Pada penelitian ini, penulis menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan dan korelasi dengan kajian yang sedang dibahas, penelitian ini *pertama* ditulis oleh Syaifullah yang berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Gowa”. Dalam kajiannya Syaifullah mengungkapkan bahwa pemerintah Makassar berupaya mengembangkan sektor pariwisata sebagai substitusi sektor agraris, jasa dan

industri sebagai tolok ukur pembangunan daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa Nomor 1/9 Tahun 2016 dengan mengembangkan wisata alam, wisata buatan dan wisata sejarah (Syaifullah, 2021).

Penelitian kedua, Afianti Nur Sa'idah yang berjudul "Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung". Dalam kajiannya Sa'idah menyatakan bahwa pengembangan pariwisata oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dijalankan melalui bentuk kebijakan lintas sektoral yang melibatkan berbagai dinas dan kemudian berhasil dirumuskan optimalisasi redistribusi wisata, pajak hotel, restoran dan hiburan di bawah manajemsn Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung (Sa'idah, 2017).

Penelitian *ketiga*, ditulis oleh Dini Yulianti yang berjudul "Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat : Studi Kasus Masyarakat Pelaku Usaha di Sekitar Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat". Jurnal E-Thesis, IAINM Metro, Vol.3 Maret 2020. Dalam kajiannya Dini Yulianti menyatakan bahwa pariwisata memiliki peranan penting bagi perekonomian kota Lampung karena bukan hanya dapat dirasakan oleh pihak swasta dan pemerintah, namun juga masyarakat secara luas dan dampak pengembangan pariwisata terhadap kesenjangan masyarakat di sekitar Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat berhasil berjalan secara positif yang ditandai dengan munculnya beberapa usaha pariwisata, diantaranya kuliner, penginapan, laundry dan lain-lainnya (Yulianti, 2020).

Penelitian *keempat*, ditulis oleh Nainunis Nailati yang berjudul “Strategi Pengembangan Obyek Wisata Alam Puncak Sosok di Desan Bawuran Pleret Bantul”. Dalam kajiannya Nainunis Nailati menyatakan bahwa pengembangan pariwisata baru tidak lepas dari peran pemerintra Kabupaten Bantul, khususnya Dinas Pariwisata yang berperan dalam pengembangan obyek wisata alam Puncak Sosok Bawuran terbentuk karena peranan ramaja di wilayah tersebut dalam mengelola lahan yang semula tidak digunakan yang kemudian ditindaklanjuti dengan peran Dinamis Pariwisata Kabupaten Bantul melalui pelatihan skill (Nailati, 2020).

Penelitian *kelima*, ditulis oleh Fitriana yang berjudul “Strategi Pengembangan Potensi Dusun Plesedan Menuju Destinasi Wisata Baru Kabupaten Bantul”. Dalam kajiannya Fitriana menyatakan bahwa pariwisata berbasis eco-village atau desa wisata menjadi fenomena yang populer pada dekade 2010-an dan untuk untuk mengembangkan pariwisata ini diperlukan berbagai kebijakan secara menyeluruh dengan melibatkan fungsi pemerintah melalui strategi pengembangan potensi Dusun Plesedan, hal dijalankan karena adanya kekuatan dan peluang yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan fasilitas sederhana, yaitu gardu pandang sebagai landmark dan papan sapta pesona (Fitriana, 2016).

Penelitian *keenam*, ditulis oleh Dewi Puspitasari yang berjudul “Strategi Pengembangan Produk Pariwisata : Studi Kasus Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul”. Dalam kajiannya Dewi Puspitasari menyatakan bahwa pariwisata yang cukup dikenal oleh khalayak memerlukan branding agar dapat bertahan di

persaingan obyek wisata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang semakin pesat, untuk itu strategi pengembangan Pantai Parangtritis tidak lepas dari pembentukan kelompok sadar wisata yang menyebabkan persaingan usaha menjadi lebih sehat, serta melalui strategi promosi dan diversifikasi produk wisata (Puspitasari, 2019).

Penelitian *ketujuh*, ditulis oleh Reka Anita yang berjudul “Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Industri Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara”. Dalam kajiannya Reka Anita menyatakan bahwa pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan keuntungan dan manfaat dalam skala yang luas, meskipun demikian sektor ini cenderung rentan terhadap kondisi sosial dan keamanan, termasuk pandemi dan wabah penyakit.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor industri pariwisata di Provinsi Sumatera Utara bahwa pandemi wabah ini telah menyebabkan dampak bagi keterpurukan di Provinsi Sumatera Utara lebih dari 40%, sedangkan pariwisata di provinsi ini menjadi pilar penopang perekonomian daerah dan sebagian masyarakat (Reka, 2020).

Penelitian *kedelapan*, ditulis oleh Muzakkir yang berjudul “Strategi Pengelolaan Pariwisata di Masa Covid-19 : “Studi Wisata Taman Dolan Kota Batu”. Dalam kajiannya Muzakkir menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memerlukan penanganan secara menyeluruh agar penanganan masalah ini dapat sejalan dengan pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor pariwisata. Strategi pengelolaan pariwisata di masa pandemi Covid-19 pada Taman Dolan dijalankan dengan pemberian izin Dinas Pariwisata, kerjasama antara pihak

swasta, pemerintah dan masyarakat, serta pengawasan langsung kepada para wisatawan agar tetap menerapkan protokol kesehatan (Muzakkir, 2021).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memuat berbagai jurnal-jurnal terkait, diuraikan pada tabel 1.2. sebagai berikut :

**Tabel 1.2.**

**Penelitian-penelitian Terdahulu Sebagai *Literature Review***

No.	Penulis dan Tahun Terbit	Judul	Jumlah Referensi dan Metodologi	Hasil Analisis
1	Syaifulloh diterbitkan pada tahun 2021	Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Gowa	12 buku 2 jurnal 8 laporan dan menggunakan teknik pengumpul data sekunder, wawancara dan observasi.	Pengembangan pariwisata di Kabupaten Gowa dijalankan di bawah peraturan Rencana Strategis Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa Nomor 1/9 Tahun 2016 dengan mengembangkan wisata alam, wisata buatan dan wisata sejarah.
2	Afianti Nur Sa'idah diterbitkan pada tahun 2017	Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung	11 buku 8 jurnal 24 laporan, 3 situs website dan menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpul data sekunder dan wawancara	Pengembangan pariwisata oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dijalankan melalui optimalisasi redistribusi wisata, pajak hotel, restoran dan hiburan.
3	Dini Yulianti diterbitkan pada tahun 2020	Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat : Studi Kasus Masyarakat Pelaku Usaha di Sekitar Pantai Tanjung Setia Kabupaten	10 buku 6 jurnal 4 laporan dan 6 data website, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpul data sekunder, wawancara dan observasi	Dampak pengembangan pariwisata terhadap kesenjangan masyarakat di sekitar Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat berhasil berjalan secara positif yang ditandai dengan munculnya beberapa usaha pariwisata, diantaranya kuliner, penginapan, laundry dan lain-lainnya.

No.	Penulis dan Tahun Terbit	Judul	Jumlah Referensi dan Metodologi	Hasil Analisis
		Pesisir Barat		
4	Nainunis Nailati diterbitkan pada tahun 2020	Strategi Pengembangan Obyek Wisata Alam Puncak Sosok di Desan Bawuran Pleret Bantul.	11 buku 5 jurnal 4 laporan dan 4 data website, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpul data sukunder, wawancara dan observasi	Pengembangan obyek wisata alam Puncak Sosok Bawuran terbentuk karena peranan ramaja di wilayah tersebut dalam mengelola lahan yang semula tidak digunakan yang kemudian ditindaklanjuti dengan peran Dinamis Pariwisata Kabupaten Bantul melalui pelatihan skill.
5	Fitriana diterbitkan pada tahun 2017	Strategi Pengembangan Potensi Dusun Plesedan Menuju Destinasi Wisata Baru Kabupaten Bantul	8 buku 8 jurnal 3 laporan dan 7 data website, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpul data sukunder, wawancara dan observasi	Strategi pengembangan potensi Dusun Plesedan dijalankan karena adanya kekuatan dan peluang yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan fasilitas sederhana, yaitu gardu pandang sebagai landmark dan papan sapta pesona.
6	Dewi Puspitasari diterbitkan pada tahun 2019	Strategi Pengembangan Produk Pariwisata : Studi Kasus Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul	11 buku, 4 jurnal 6 laporan dan 7 data website, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpul data sukunder dan wawancara	Strategi pengembangan Pantai Parangtritis tidak lepas dari pembentukan kelompok sadar wisata yang menyebabkan persaingan usaha menjadi lebih sehat, serta melalui strategi promosi dan diversifikasi produk wisata.
7	Reka Anita diterbitkan pada tahun 2020	Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Industri Pariwisata di Provinsi Sumatera Utara	9 buku, 3 jurnal 3 laporan dan 6 data website, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpul data sukunder dan wawancara	Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor industri pariwisata di Provinsi Sumatera Utara bahwa pandemi wabah ini telah menyebabkan dampam bagi keterpurukan di Provinsi Sumatera Utara lebih dari 40%, sedangkan pariwisata di provinsi ini menjadi pilar penopang perekonomian daerah dan sebagian masyarakat.

No.	Penulis dan Tahun Terbit	Judul	Jumlah Referensi dan Metodologi	Hasil Analisis
8	Muzakkir diterbitkan pada tahun 2021	Strategi Pengelolaan Pariwisata di Masa Covid-19 : Studi Wisata Taman Dolan Kota Batu	14 buku, 3 jurnal 4 laporan dan 4 data website, penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpul data sukunder dan wawancara	Strategi pengelolaan pariwisata di masa pandemi Covid-19 pada Taman Dolan dijalankan dengan pemberian izin Dinas Pariwisata, kerjasama antara pihak swasta, pemerintah dan masyarakat, serta pengawasan langsung kepada para wisatan agar tetap menerapkan protokol kesehatan.

## F. Kerangka Dasar Teori

Dalam upaya menjawab rumusan masalah maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang relevan, yaitu teori peran pemerintah. Gambaran mengenai pendekatan ini diuraikan sebagai berikut.

### 1. Teori Peran

Teori peran merupakan pendekatan yang berpangkal pada peranan atau *role* yang merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan status. Ketika seseorang atau institusi memegang kendali dan kemudian melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka obyek tersebut adalah sedang menjalankan peranan. Pada dasarnya terdapat pembeda antara kedudukan dan peranan yaitu kedudukan bersifat rigid dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sedangkan peran lebih fleksibel yang berkaitan dengan posisinya untuk menyelesaikan suatu fenomena berkaitan dengan struktur di suatu masyarakat (Soekanto, 2005:243).

Peran merupakan lebih banyak menunjuk pada fungsi dan penyesuaian diri sebagai proses. Dengan demikian seseorang yang menduduki suatu institusi akan memiliki suatu peran. Pada dasarnya dalam teori peran terdapat tiga hal penting, yaitu :

- a. Peranan memiliki norma-norma yang dihubungkan dengan posisi ataupun tempat seseorang dalam masyarakat dan peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan merupakan perilaku individu yang penting struktur sosial masyarakat. (Soekanto, 2005:244-245)

Teori peran menegaskan perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini bersamsumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat tuntutan dan harapan terhadap peranan yang dipegang oleh aktor politik. Dengan demikian terdapat masukan (input) yang mempengaruhi seseorang atau stakeholder dan kemudian mendorong suatu kebijakan dan pada akhirnya memerlukan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan sebagai output dari peran tersebut (Soekanto, 2005:244-245).

## **2. Teori Kebijakan**

Sebuah negara memerlukan implementasi kebijakan untuk dapat mendukung pencapaian kepentingan nasional ataupun sebagai pendekatan dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan pembangunan dalam

negeri ataupun hubungan luar negeri. Istilah kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan maknanya dengan tujuan, program, keputusan hukum dan proposal. Padahal sesungguhnya istilah kebijakan itu memiliki definisi dan pengertian tersendiri yang berbeda. Pada definisi yang berbeda menyatakan bahwa menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam buku *Labyrinths of Democracy*, kebijakan yaitu :

*The policy is a decision remains characterized by consistency and repetition of the behaviour of those who make policy itself and from those who comply with the decision*“(Kebijakan adalah sebuah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat kebijakan itu sendiri dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut). (Friedrich dalam Agustino, 2012:7).

Kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi yang dimaksudkan sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Istilah kebijakan secara garis besar dapat diterapkan pemerintahan, organisasi, kelompok swasta ataupun individu. Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Menyebutkan kebijakan sebagai “pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan (Abidin, 2006:5).

Kemudian David Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan” (David Easton dalam Abidin, 2012:6). Hal ini mengandung konotasi tentang

kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara itu, Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai “program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. (Abidin, 2006:6)

Menurut Ealau dan Prewit (dalam Suharto, 2010:7), kebijakan adalah “sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat nyamaupun yang menaatinya”. Titmuss (dalam Suharto, 2010:7) mendefinisikan kebijakan sebagai “prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu”. Kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik mengutip pendapat Carl Friedrich Yang mengartikan kebijakan sebagai berikut:

*Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Friedrich dalam Agustino, 2012:7).*

Berkaitan dengan definisi-definisi tentang kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan. Menurut Agustino, yaitu :

- a. Pada umumnya kebijakan perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
- b. Kebijakan pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
- c. Kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
- d. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan public dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- e. Kebijakan, paling tidak secara positif, di dasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah (Agustino,2011:8).

Darwin dan Effendi menyatakan lebih lanjut bahwa terdapat lima aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu :

- a. Sifat kepentingan yang dipengaruhi. Dalam proses implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*).
- b. Kejelasan manfaat. Dalam konteks pemerintahan yang amanah, berarti pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat, dimana upaya intervensi pemerintah haruslah bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Perubahan perilaku yang dibutuhkan. Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.
- d. Aparat pelaksana. Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana.
- e. Dukungan sumber daya. Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya.

Peran institusi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi pada wilayahnya merupakan hal yang paling esensial untuk dijalankan. Menurut Soerjono Soekanto dapat diketahui bahwa peran institusi pemerintah dijalankan ketika institusi tersebut melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran insstitusi pemerintah ini dijalankan sesuai dengan instruksi dari individu / pejabat atau institusi di atasnya (Soekanto, 2002 : 243). Melalui pendapat Soerjono Soekanto maka dapat difahami bahwa peran institusi pemerintah selalu melibatkan beberapa hal penting, yaitu adanya instruksi dari pejabat atau insitusi di atasnya, adanya upaya penyelesaian suatu persoalan dengan memenuhi kebutuhan yang terjadi di kalangan masyarakat dan adanya hubungan timbal balik antara instansi dan masyarakat.

Pendapat selanjutnya tentang peran institusi pemerintah dikemukakan oleh Narwoko dan Suyanto bahwa peran ini dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, diantaranya melalui sosialisasi / promosi, menanamkan norma-norma dan pengetahuan, mengembangkan kelompok masyarakat, menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi (Narwoko dan Suyanto, 2010 : 160). Kemudian berbagai hambatan yang muncul atas peran institusi pemerintah berkaitan dengan hambatan dan pencapaian dapat berasal dari dalam insitusi dan luar institusi. Adapaun faktor internal institusi yang menjadi penghambat diantaranya sumber daya manusia, anggaran, political will dan lain-lainnya, sedangkan faktor eksternal insitusi diantaranya kronisitas persoalan, sikap dan dukungan dari masyarakat, faktor geo-politik dan lain-lainnya (Narwoko dan Suyanto, 2010:160).

### **3. Teori Pemulihan**

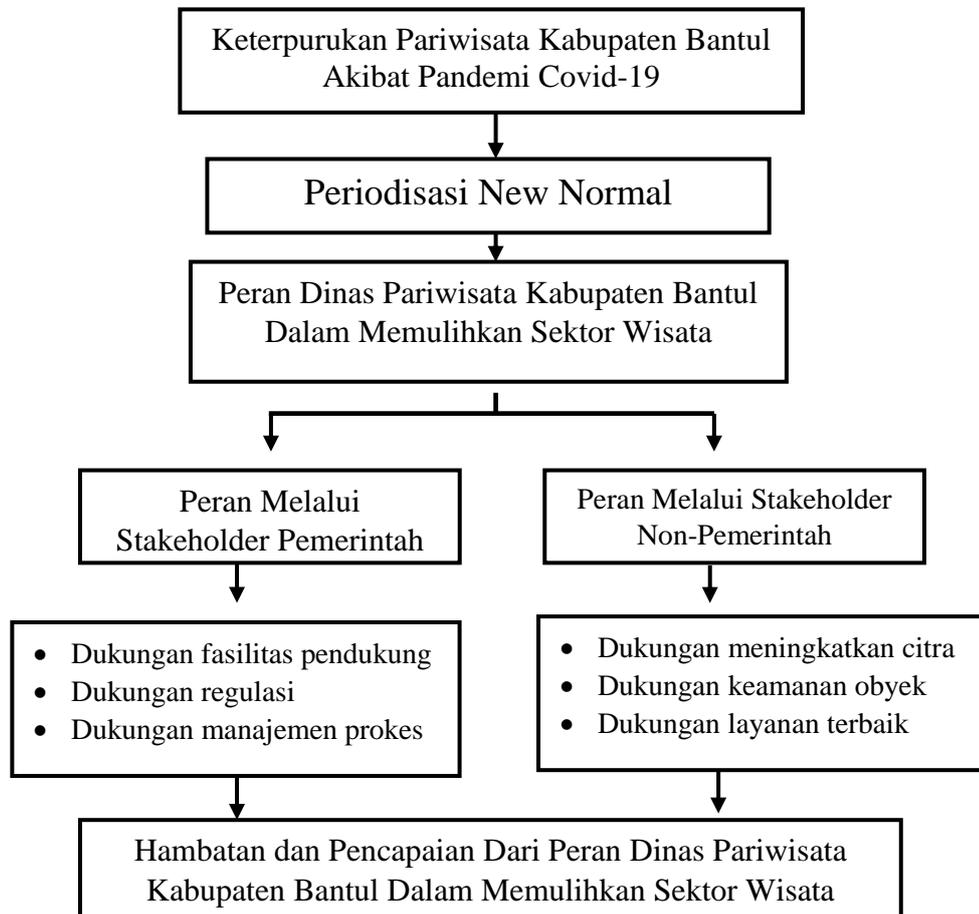
Pemulihan merupakan suatu upaya perbaikan kembali pascabencana, dalam hal ini hanya institusi yang mempunyai wewenang saja yang bertanggung jawab dalam proses pemulihan. Sehingga pemulihan merupakan salah satu fase dari tiga manajemen bencana yang sangat penting yang meliputi;

1. Mitigasi, yakni melakukan persiapan terhadap penanganan untuk dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana,
2. Respons, yaitu sigap dalam mengambil tindakan setelah kejadian tujuannya adalah untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan fisik dan properti,
3. pemulihan, yaitu proses normalisasi atau mengembalikan kepada keadaan normal (Beach dalam Kurniati dkk : 2022).

Pada konteks lingkungan ekosistem, pemulihan pascabencana ini dapat berupa pemanfaatan media baik secara umum maupun media pembelajaran yang diarahkan untuk membangun kesiapsiagaan dan resiliensi dalam menghadapi bencana. Media yang berperan secara aktif memberikan edukasi terhadap anak usia dini dan masyarakat secara luas dapat menjadi sarana dalam meningkatkan pemahaman mengenai kebencanaan sekaligus sebagai media dalam pemulihan pascabencana itu sendiri. (Beach dalam Kurniati dkk : 2022).

Gambaran mengenai kerangka berpikir dapat dilihat pada bagan 1.1. sebagai berikut :

### **Bagan 1.1 Kerangka Berpikir**



Sumber : Diolah penulis untuk keperluan penelitian

### **G. Definisi Konseptual**

Berdasarkan teori dari sumber-sumber yang dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan definisi konseptual, yaitu :

1. Peran pemerintah adalah perilaku politik yang diwujudkan melalui rangkaian konsep dan rangkuman keputusan sehingga terbentuknya suatu kebijakan, didalamnya termuat ide dan strategi untuk menyelesaikan ataupun mencapai tujuan tertentu yang dicirikan atas kontinuitas dan konsistensi.

2. Pemulihan merupakan suatu tindak tanggap atau upaya yang dilakukan dalam hal ini wewenang dan tanggungjawab pemerintah dalam menyikapi suatu bencana, kemudian pemulihan pascabencana merupakan salah satu fase dari tiga manajemen bencana yang sangat penting yang meliputi; (1) Mitigasi, yakni melakukan persiapan terhadap penanganan untuk dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana (2) Respons, yaitu sigap dalam mengambil tindakan setelah kejadian tujuannya adalah untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan fisik dan properti; dan (3) pemulihan, yaitu proses normalisasi atau mengembalikan kepada keadaan normal (Beach dalam Kurniati dkk : 2022).
3. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat secara sistematis dan konsisten oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum dan tujuan dibuatnya suatu kebijakan pemerintah ialah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian peraturan.
4. New normal merupakan perubahan perilaku untuk melakukan aktifitas secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu

pada bagaimana mengukur suatu variabel. Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memulihkan sektor pariwisata merupakan wujud peran yang dibuat secara sistematis dan konsisten oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu melalui pelibatan stakeholder pemerintah dan non-pemerintah, serta dukungan fasilitas pendukung, peraturan (regulasi), manajemen protokol kesehatan, layanan terbaik, dukungan keamanan dan upaya dalam meningkatkan citra pariwisata Bantul.
2. Pemulihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah merealisasikan berbagai rancangan keputusan yang dibuat dimana diantaranya adalah menerapkan kebijakan, normalisasi tempat wisata, membangun sarana prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah pusat dalam hal ini menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan pariwisata dapat beroperasi seperti sebelumnya secara bertahap.
3. New normal merupakan perubahan perilaku dalam hal ini di kabupaten bantul adalah dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang menjadi momentum bagi pemulihan sektor pariwisata.
4. Hambatan dan pencapaian atas peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam memulihkan sektor pariwisata diwujudkan peningkatan angka kunjungan pariwisata secara bertahap, sedangkan hambatannya secara internal adalah keterbatasan sumber daya manusia dari insitusi Dinas

Pariwisata Kabupaten Bantul dan juga keterbatasan anggaran, serta fluktuasi kasus yang menyebabkan perubahan kebijakan pusat sebagai faktor eksternal institusi.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan atau diteliti (Sukandarrumidi, 2006 : 40). Metode penelitian membantu dalam pengolahan data untuk kemudian dijadikan hasil akhir dari suatu penelitian. Ada dua jenis metode penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data, teori yang ada sebagai bahan penjabar. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:24-25).

### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Unit Analisis**

Unit analisis pada penelitian ini adalah suatu institusi negara yang dalam hal ini mempunyai tanggungjawab dan wewenang berkaitan dengan pengelolaan sektor pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertanggung jawab dan berwenang dalam mengelola sektor wisata untuk memulihkan kembali sektor wisata yang terdampak pandemi pada masa new normal. Pihak-pihak yang menjadi narasumber wawancara meliputi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan perwakilan masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata di Kabupaten Bantul.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda melalui metode observasi. Kelebihan dari data primer yaitu kita secara langsung mendapatkan data dari narasumber secara langsung melalui wawancara.

Pada data primer ini wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan Pelaku Wisata yang juga termasuk sebagai perwakilan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara atau tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Data sekunder bisa diperoleh melalui data penelitian yang pernah dilakukan bisa bersumber dari pendapat, intrerpretasi atau bisa bersumber dari internet, buku, tesis, jurnal dan penelitian lainnya. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumentasi website terkait, internet, dan berita online.

## **5. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan hal terkait data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan untuk menguatkan data yang dibutuhkan secara empiris.

### **a. Wawancara**

Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara adalah cara yang paling efisien dan akurat. Karena dengan dilakukannya wawancara dengan narasumber terkait, data yang diperoleh tidak diragukan keakuratannya dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang konteksnya tertutup. Wawancara atau metode interview, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaraningrat,1983:84).

Narasumber wawancara pada penelitian ini meliputi tiga orang, masing-masing adalah :

- Kwintarto Heru Prabowo yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- Katarina Issri PH. yang menjabat sebagai Kepala Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Informasi dan Kerjasama Kepariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- Mohammad Noormas AS. yang menjabat sebagai pengurus PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kabupaten Bantul.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan dokumentasi berupa gambar, video atau laporan terkait sebagai bahan penguat keakuratan penelitian terbaru. Teknik dokumentasi adalah suatu yang memberikan bukti dimana dipergunakan sebagai alat pembukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi penjelasan atau dokumentasi dalam naskah atau informasi yang tertulis (Komaruddin, 1997 :19).

#### **c. Observasi**

Observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

## **6. Teknik Analisa Data**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan melalui pencatatan, penyuntingan dan diuji secara keakuratan data.

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

### **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan sebuah cara untuk menyusun informasi yang didapat di lapangan, disunting dan kemudian diolah untuk bisa disajikan sebagai data yang relevan. Penyajian data ini membantu dalam memahami apa yang terjadi untuk mengatasi permasalahan atau topik penelitian yang sedang dilakukan.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan ketika seluruh data telah teruji kebenarannya dan permasalahan yang ada sudah menemukan jawabannya. Penarikan kesimpulan dapat berupa kesimpulan, saran dan kesimpulan nantinya digunakan sebagai hasil akhir dari penelitian yang dilakukan sebagai narasi. Sebuah kesimpulan yang baik tersusun berdasarkan fakta dan tidak menjatuhkan pihak manapun.